

## PROSPEK PENGEMBANGAN MODAL USAHA PETANI KECIL MELALUI PROGRAM P<sub>4</sub>K DI KABUPATEN BANTUL

*The Prospect of The Small Farmer's Capital in The Small Farmer  
Development Program in Bantul Regency*

**Nanik Dara Senjawati dan Budi Widayanto**

Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta

### ABSTRACT

*The study is aimed to investigate the development of the small farmers' capital in Small Farmer Development Program. The trend analysis was estimated by Ordinary Least Square methods. The results show that the credit under the program could not hasten the growth of own capital. That was indicated by the decrease in the own capital when the credit was suspended. The alternative methods in increasing the farmers' capital might be proposed as : (1). give disparities of the sum of credit depend on the kind business, (2). Increase the group savings, (3). implement the profit sharing business for the beginner groups.*

*Key words : Small farmer, capital, empowering.*

### PENDAHULUAN

Kapital yang disebut juga barang modal merupakan salah satu *input* yang dibutuhkan dalam proses produksi. Faktor modal ini sangat menentukan keberlanjutan suatu usaha, baik usaha dalam skala besar maupun kecil.

Sesuai dengan orientasi pembangunan pada saat ini yaitu pertanian yang berorientasi agribisnis, maka untuk pengembangan usaha diperlukan jiwa kewirausahaan dan modal yang cukup besar. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Indonesia termasuk kriteria petani kecil dengan kondisi sosial ekonomi yang sangat terbatas. Dilema antara pemenuhan kebutuhan konsumsi dengan menyisihkan anggaran rumahtangga untuk kegiatan produksi sering tak terelakkan.

Bagi rumahtangga tani miskin ada kecenderungan bahwa sebagian besar pendapatan yang diperoleh, dialokasikan untuk konsumsi pangan dan hanya sebagian kecil saja yang dialokasikan untuk produksi serta tabungan guna pemupukan modal usaha atau kecenderungan marginal untuk

menabung (*marginal propensity to save*). Keadaan ini menunjukkan bahwa kemampuan petani melakukan pemupukan modal sangat terbatas.

Kenyataan lain menunjukkan bahwa penduduk miskin di pedesaan selain dihadapkan pada lingkaran setan (*vicious circle*) dalam ekonomi pembangunan antara rendahnya pendapatan, tabungan, investasi, produktivitas, dan kembali ke pendapatan, juga dihadapkan pada lingkaran perkreditan antara rendahnya pendapatan, tiadanya agunan, besarnya risiko, dan tingkat pengembalian yang rendah. Dengan demikian kemiskinan memberikan citra yang negatif terhadap penyelenggaraan kredit sebagai kredit statis dan konsumtif, meskipun kredit merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan (Widodo, 1991).

Berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan, kredit merupakan salah satu bentuk instrumen untuk menstimulasi pengembangan modal usaha, yang selanjutnya akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan serta mempercepat transfer teknologi. Kredit P<sub>4</sub>K diberikan tanpa agunan dan dimulai dari kegiatan kelompok. Upaya memberdayakan petani kecil dilakukan melalui suatu proses pendidikan yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip menolong diri sendiri dan berlandaskan pada peningkatan kemampuan menghasilkan pendapatan. P<sub>4</sub>K juga mendidik petani kecil untuk meningkatkan minat menabung. Meningkatnya pendapatan disertai dengan kesadaran menabung akan mendorong pembentukan modal usaha secara mandiri.

Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani miskin di satu sisi dan di sisi lain bahwa sebagian besar petani dalam menyediakan modal sangat terbatas, dalam tulisan ini dipertanyakan apakah kredit P<sub>4</sub>K dapat meningkatkan kemampuan modal petani.

## KERANGKA PEMIKIRAN

Upaya pengentasan warga miskin tidak hanya semata-mata mengandalkan pada kebijaksanaan ekonomi makro tetapi harus diimbangi dengan kebijaksanaan mikro berupa terobosan-terobosan yang langsung memberikan pengaruh pada peningkatan produktivitas golongan miskin tersebut (Tjiptoherijanto, 1997).

Pada tingkat makro, kebijakan ditujukan untuk mendorong pertumbuhan yang menyangkut peningkatan lapangan kerja, dan memelihara kestabilan harga. Kebijakan makro ini telah mendukung keberhasilan pencapaian swasembada pangan dan pengembangan usaha kecil serta koperasi.

Pada tingkat mikro, kebijakan ditujukan untuk meningkatkan dan memperluas akses golongan yang berpenghasilan rendah kepada pelayanan-pelayanan keuangan/perbankan yang menunjang kegiatan produktif mereka. Hal ini mencakup upaya-upaya untuk makin memperluas jaringan pelayanan keuangan/ perbankan, mengembangkan lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pola kegiatan penduduk penghasilan rendah serta mendidik dan menyiapkan mereka agar siap memanfaatkan seluas-luasnya jasa pelayanan lembaga-lembaga keuangan/perbankan, baik yang menyangkut kegiatan kredit maupun tabungan. Dalam hal ini perbankan perlu mendidik pengusaha kecil untuk meningkatkan minat menabung karena untuk kesinambungan usaha diperlukan pembiayaan sendiri di samping pembiayaan dari kredit perbankan (Salam, 1995).

Hadiwigeno (1979) menyatakan bahwa kebijaksanaan ekonomi dan pertanian telah menimbulkan perubahan-perubahan di dalam kehidupan sosial ekonomi di sektor pertanian dan perdesaan pada umumnya. Semua perubahan ini sudah barang tentu sangat mempengaruhi tingkah laku finansial (*financial behavior*) petani, dan juga pola kegiatan konsumsi, tabungan serta investasi rumah tangga petani dan warga desa lainnya. Dengan demikian struktur modal, tabungan dan investasi di sektor pertanian dan perdesaan akan dipengaruhi pula. Di dalam usaha untuk melancarkan proses perubahan dan peralihan yang terjadi di sektor pertanian dan perdesaan, dan untuk dapat menggariskan dan mengarahkan kebijaksanaan pertanian, maka sangatlah diperlukan adanya data dan pengetahuan yang lengkap tentang struktur modal, tabungan, kegiatan investasi dan komponen-komponen di sektor pertanian dan perdesaan.

Masalah yang sering dihadapi oleh petani adalah terbatasnya modal usaha, terbatasnya modal tersebut belum seluruhnya dapat teratasi karena bantuan permodalan yang diberikan pemerintah dengan memberikan kredit tidak selamanya dapat dilakukan. Hal ini disebabkan adanya tunggakan kredit, sehingga berakibat merugikan bagi petani peminjam dan pemberi pinjaman. Bagi peminjam, tunggakan kredit berakibat petani tidak dapat memperoleh pinjaman. Bagi pemberi pinjaman, tunggakan kredit yang cukup besar dapat menyebabkan kapasitas meminjamkan menurun (Sacay dan Agabin, 1985).

Menurut Nasution (1986) masalah lain yang dihadapi dalam penyaluran kredit adalah ketiadaan lembaga keuangan yang mampu mengkoordinasi dana-dana yang masuk ke perdesaan dan yang ada di

perdesaan, sistem birokrasi yang rumit, serta kepercayaan masyarakat pada badan-badan keuangan di perdesaan masih rendah.

Berdasarkan sumbernya, kredit perdesaan dapat berasal dari kredit formal (terorganisir) dan kredit informal (tidak terorganisir). Kredit formal adalah kredit yang pelaksanaannya mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh bank sentral, sedang pada kredit informal pelaksanaannya tidak mengikuti aturan perbankan resmi (Gathak dan Ingersent, 1984, Colter, 1984).

Lembaga perkreditan formal dapat digolongkan menjadi dua yaitu bank resmi (formal) dan lembaga pemberi kredit (semi formal). Bank formal beroperasi secara perbankan dan diatur dengan undang-undang. Lembaga pemberi kredit semi formal ditujukan untuk melayani kelompok yang tidak terjangkau oleh bank formal. Dengan demikian pemerintah dapat menyalurkan dana pada kelompok tradisional (Hamid dan Hudiyanto, 1987). Kredit formal dapat berbentuk kredit komersial di mana untuk memperoleh kredit komersial ini diperlukan syarat-syarat yang telah ditentukan seperti prosedur, jaminan, pengembalian, suku bunga, dan lain-lain. Kredit semacam ini belum menjangkau petani karena syarat-syarat yang ditentukan belum dapat dipenuhi.

Disamping itu kredit formal juga dapat berbentuk kredit program. Ciri-ciri kredit program adalah kredit diberikan kepada petani dan nelayan dalam bentuk paket, bunga kredit disubsidi oleh pemerintah, dan kredit diberikan tanpa jaminan. Cara pemberian kredit semacam ini dipandang efektif untuk mengatasi kekurangan modal dikalangan petani, karena pembuat kebijakan beranggapan bahwa petani tidak *bankable*, kredit akan mempercepat kenaikan produksi dan kredit akan menghindarkan petani dari eksploitasi para pelepas uang (Hartono, 1992).

Kredit P<sub>4</sub>K sebagai upaya menanggulangi kemiskinan diberikan tanpa agunan yang dimulai dari kegiatan kelompok. Upaya penanggulangan tersebut dilakukan dengan cara memberdayakan (*empowering*) petani miskin yang dilaksanakan melalui suatu proses pendidikan yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip menolong diri sendiri (*to help people help themselves*), dan berlandaskan pada peningkatan kemampuan menghasilkan pendapatan (*income generating capacity*), sehingga mampu mengakses fasilitas pembangunan yang tersedia dalam aspek sumberdaya, permodalan, teknologi, dan pasar.

## METODE PENGAJIAN

Kajian dari tulisan ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bantul dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Bantul merupakan

daerah pelaksanaan P<sub>4</sub>K dengan jenis usaha binaan yang cukup bervariasi. Di wilayah ini terdapat variasi dari program P<sub>4</sub>K tersebut, yaitu I adalah petani miskin yang belum pernah memperoleh bantuan kredit program, II sampai dengan V masing-masing adalah petani yang telah memperoleh kredit program tahap II sampai dengan tahap IV dan VI adalah petani yang telah dinyatakan lulus pembinaan.

Perkembangan modal usaha petani dianalisis menggunakan analisis kecenderungan (*trend analysis*) dengan *Ordinary Least Square Method*, sebagai berikut :

$$M_s = a_0 + a_1 t$$

Keterangan :

- M<sub>s</sub> : Modal usaha sendiri
- a<sub>0</sub> : Intersep
- a<sub>1</sub> : Parameter yang diestimasi
- t : Tahap pemberian kredit

Selanjutnya, angka pertumbuhan modal usaha ditentukan dengan cara :

$$\begin{aligned} \ln Q &= a_0 + a_1 t \\ \eta &= (e^{a_1} - 1) \times 100\% \end{aligned}$$

Keterangan :

- Q : Modal usaha
- t : Tahap pemberian kredit
- η : Angka pertumbuhan

## PENDAPATAN DAN PERKEMBANGAN MODAL USAHA PETANI KECIL

Sumber permodalan usaha dapat berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Bagi peserta P<sub>4</sub>K umumnya modal pinjaman berasal dari P<sub>4</sub>K berupa kredit yang disalurkan melalui BRI, sedang bagi rumah tangga yang bukan peserta P<sub>4</sub>K pinjaman modal berasal kredit yang lain baik formal maupun informal sesuai kehendaknya.

Pada awalnya tujuan pemberian kredit P<sub>4</sub>K sebagai tambahan modal adalah untuk menstimulir produktivitas, meningkatkan pendapatan, mempercepat transfer teknologi, dan pengembangan usaha. Selanjutnya, peserta binaan diharapkan mampu membiayai usahanya sendiri tanpa memperoleh bantuan modal.

Kredit P<sub>4</sub>K yang disalurkan berasal dari ADB (*Asian Development Bank*), IFAD (*International Food Agricultural Development*), dan dari APBN. Pada fase II, kredit diberikan dalam 4 tahap dengan jumlah kredit per-tahap per-anggota :

- Tahap 1 : Rp. 75 000,00
- Tahap 2 : Rp. 200 000,00
- Tahap 3 : Rp. 250 000,00
- Tahap 4 : Rp. 300 000,00

Bantuan modal usaha yang relatif kecil yang dirasakan petani belum memadai untuk menjalankan usaha produktifnya, menyebabkan petani kurang intensif dalam mengelola usaha pokoknya. Ada kecenderungan bagi petani untuk mengalihkan modal pinjaman tersebut pada unit usaha lain yang bukan usaha pokok (usaha binaan P<sub>4</sub>K). Kecenderungan menunjukkan bahwa 35% peserta dengan usaha binaan ternak ayam buras mengalihkan modal usahanya pada usaha dagang keliling (*eber-eber*).

Bagi rumahtangga tani miskin dengan kemampuan permodalan yang sangat terbatas, usaha dagang menjadi pilihan untuk dikembangkan, oleh karena risikonya kecil, tidak memerlukan modal yang besar, dan perputaran modalnya relatif cepat. Sejalan dengan hal tersebut Purwaningsih (1997) mengemukakan bahwa tingkat perputaran modal kerja usaha dagang relatif lebih tinggi (3,48) dibandingkan industri (2,53), dan usaha ternak (2,23).

**Tabel 1. Pendapatan Rumahtangga Tani Miskin Dari Berbagai Sumber**

No	Sumber pendapatan	Non P <sub>4</sub> K		P <sub>4</sub> K		Pasca P <sub>4</sub> K	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Padi	167 698	3,9	269 479	2,4	407 276	4,2
2	Non padi	474 872	11,0	163 563	1,5	328 454	3,3
3	Pekarangan	137 750	3,2	296 490	2,7	642 924	6,5
4	Ternak	257 200	6,0	678 271	6,7	731 646	7,5
5	Dagang	1 239 325	28,8	3973 000	36,1	5 866 231	59,7
6	Kerajinan	536 950	12,5	3742 152	34,0	271 015	2,8
7	Buruh tani	131 800	13,0	207 950	1,4	0,0	0,0
8	Buruh luar pertanian	1 358 100	31,6	900 450	8,2	1 082 308	11,0
9	Sumber lain	0,0	0,0	762 213	6,9	492 308	5,0
Jumlah		4 303 695	100,0	10 993 568	100,0	9 822 162	100,0

Tabel 1, menunjukkan bahwa rumahtangga tani miskin usaha dagang memberikan kontribusi yang relatif tinggi terhadap total pendapatan rumahtangga, dibandingkan usaha lainnya.

Hasil estimasi perkembangan modal usaha sendiri menunjukkan *trend* yang negatif (-1566) meskipun tidak signifikan. Hasil estimasi ini memberikan indikasi bahwa pada tahap pasca pembinaan, di mana petani sudah tidak lagi memperoleh bantuan kredit, modal usaha sendiri cenderung semakin tidak berkembang.

Peranan modal yang cukup besar terhadap keberhasilan pengembangan usaha, sangat tergantung pada kemampuan rumahtangga dalam menyediakan modal usaha. Untuk kegiatan produksi, petani memerlukan uang tunai guna membeli input. Sebagian uang untuk membeli *input* tersebut dipenuhi dari modal sendiri, tetapi sebagian lagi harus dicari dari luar yaitu berupa pinjaman.

Struktur modal yang digunakan oleh petani sebagian besar (65,1% dari total modal) merupakan modal sendiri terutama pada tahap-tahap awal. Namun setelah tahap ketiga tampak bahwa proporsi modal sendiri terhadap total modal usaha relatif menurun, bahkan pada tahap kelima di mana petani telah dinyatakan lulus pembinaan (sudah tidak memperoleh bantuan kredit), proporsi modal sendiri terhadap total modal menurun sangat tajam. Untuk kelangsungan usahanya, kelompok pasca binaan memanfaatkan tabungan kelompok yang jumlahnya relatif sangat kecil

**Tabel 2. Struktur dan Pertumbuhan Modal Usaha Rumahtangga Tani Miskin**

Tahap Pemberian Kredit	Modal Sendiri ( 000 Rp )		Modal Pinjaman ( 000 Rp )		Modal Total ( 000 Rp )
0	8 728,04	(73,7)	3 096,30	(26,3)	11 844,34
1	15 022,70	(77,5)	4 356,20	(22,5)	19 382,90
2	35 003,60	(73,7)	12 470,63	(26,3)	47 663,23
3	6 564,25	(34,7)	123 809	(65,3)	18 445,15
4	11 951,55	(56,2)	9 314,95	(43,8)	21 266,50
5	254,27	(100,0)	0	(00,0)	254,27
Rata-rata	12.920,73	(69,3)	6 936,50	(30,7)	19 857,23
Pertumbuhan (%) :					
- Tahap 0-4	1,97		38,37		12,20
- Tahap 0-5	-43,26		-75,64		-43,59

Keterangan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase

Berdasarkan Tabel 2, dapat ditunjukkan bahwa total modal yang digunakan oleh petani mampu berkembang cepat yaitu dengan tingkat pertumbuhan sebesar 12,2% per tahap evaluasi. Namun demikian cepatnya tingkat pertumbuhan tersebut lebih disebabkan oleh sangat cepatnya pertumbuhan modal pinjaman.

Pertumbuhan modal sendiri relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan modal pinjaman. Hal itu memberikan indikasi bahwa bantuan modal berupa pinjaman relatif belum dapat mempercepat pertumbuhan modal sendiri, atau pemberian bantuan modal pinjaman belum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan modal sendiri.

Penerapan pola usaha bersama untuk mengatasi terbatasnya modal usaha sulit untuk diterapkan. Aktivitas peserta sehari-hari yang sangat beragam merupakan salah satu hambatan penerapan pola ini. Selain itu, jika pola ini diterapkan, ada kecenderungan bagi peserta yang berkemampuan lebih akan menguasai modal kelompok, sementara anggota kelompok yang lain hanya bekerja sebagai buruh.

Apabila dalam hubungan kerja ini telah diperhitungkan pembagian laba bersama, maka pola tersebut dapat dijadikan salah satu alternatif pemecahan. Pola ini dapat diterapkan pula pada kelompok-kelompok yang sedang akan mulai usahanya. Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah memberikan modal pinjaman yang besarnya disesuaikan dengan jenis usaha produktif yang akan dilakukan, sehingga usaha binaan benar-benar menjadi usaha mandiri.

## KESIMPULAN

Pemberian bantuan modal pinjaman relatif belum dapat mempercepat pertumbuhan modal sendiri, bahkan jika pemberian bantuan modal dihentikan, perkembangan modal sendiri cenderung semakin tidak berkembang. Besarnya bantuan modal yang tidak sesuai dengan jenis usaha binaan menyebabkan petani kurang intensif dalam mengelola usaha pokoknya, oleh sebab itu pemberian bantuan modal yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dapat dijadikan suatu alternatif pemecahan.

Bagi kelompok yang baru akan memulai usahanya penerapan pola usaha bersama dengan memperhitungkan pembagian laba bersama dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan modal. Menumbuhkan minat menabung sebagai upaya memberdayakan petani miskin perlu ditindak lanjuti misalnya dengan meningkatkan jumlah tabungan kelompok melalui mobilisasi tabungan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Colter, J. M. 1984. "Masalah Perkreditan" dalam Pembangunan Pertanian (*Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*, Faisal Kasryno). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 1984. *P4K Suatu Proyek Pengembangan Sumberdaya Manusia Bagi Keluarga Petani-Nelayan Kecil*. Departemen Pertanian Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian. Jakarta.
- Gathak, S. and Ken Ingersent. 1984. *Agriculture and Economic Development*. Harvester Press. Great Brain.
- Hadiwigeno, S. et.al. 1979. *Struktur Modal, Tabungan, dan Investasi di Sektor Pertanian dan Pedesaan*. Pusat Penelitian Ekonomi Fakultas Ekonomi UGM. Yogyakarta.
- Hamid, E.S. dan Hudiyanto. 1987. Kredit Pedesaan Kecil Indonesia: Mencari Pijakan Baru dalam makalah Seminar *Bulanan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan*. UGM. Yogyakarta.
- Hartono, S. 1992. *Modification of Small Farmer Credit in The Rice Intensification Program of Indonesia*. The Faculty of The Graduate School University of The Philipines Los Banos. Laguna. Philipines.
- Hopkin, J., A. Petter, J. Barry. C.B Baker. 1973. *Financial Management in Agriculture*. Illionis. The Interstate Printers and Publishers. Inc.
- Johnston, J. 1984. *Econometrics Methods*. Third Edition. McGraw Hill Inc. New York.
- Nasution, M. 1986. *Peranan Kelembagaan Koperasi dalam Penyaluran Kredit dan Pengelola Keuangan di Pedesaan*. Proyek Penelitian Pengembangan Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan.
- Nicholson, W. 1995. *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions*. Second Edition. The Dryden Press. Hinsdale. Illionis.
- Purwaningsih, Y. 1997. *Analisis Efisiensi Perkreditan KUD dan Kelayakan Kredit Bagi Debiturnya di Kabupaten Boyolali*. Thesis Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.
- Sacay, G.J., M.H. Agabin and C.I.E.Tanchoco. 1985. *Small Farmer Credit Dilemma, National Economic and Development Authority*. The Technical Board for Agricultural Credit, Manila, Philipines.
- Salam, A. 1995. *Kebijakan Kredit Koperasi dan Kredit Usaha Kecil*. Makalah disampaikan dalam Seminar Konsolidasi Persusuan Nasional Menyongsong Era Pasar Bebas. Agustus 1995. Jakarta.
- Tjiptoherijanto, P. 1997. *Pembangunan Jaringan Ekonomi Pedesaan Dalam Upaya Pengentasan Penduduk Miskin di Daerah Tidak Tertinggal*. Analisis CSIS No.4. Jakarta.